

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan publik adalah pembuatan laporan keuangan. Pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan keuangan publik, diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003. Tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah di tetapkan oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip prinsip akuntansi yang di tetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah yang di hasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemeintah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Laporan keuangan selanjutnya akan disampaikan kepada DPR /DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun komponen laporan keuangan yang di sampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Kementerian Agama harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance govermence*) yaitu pengelola keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasilnya yang dicapai dalam penyelenggaraan kementerian agama. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kementerian Agama akan dignakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan Kementerian Agama yang merupakan prasarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Kementerian Agama merupakan satuan kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang keagamaan dan berkewajiban meyenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada pelaksanaannya, Kementerian Agama telah berturut turut sejak tahun 2011 samapai dengan 2014 berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan (DPP) atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan

keuangan Kementerian Agama (LKKA) akan tetapi tahun 2015 hasil audi LKKA menurun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) (LHP BPK RI, 2016)

Salah satu penyebab menurunnya opini adalah bahwa Laporan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2015 adalah lapran keuangan yang pertama kali disusun menggunakan basis akuntansi akrual, sehingga masih banyak terdapat permasalahan dalam penyajian laporan keuangan ( Kementerian Agama RI, 2016)

Kepala biro keuangan Kementerian Agama RI Syihabbudin Latief menyampaikan yang menjadi penyebab utama menurunnya opini hasil audit BPK terhadap LKKA tahun 2015 dan beberapa kendala-kendala penyusunan LKAA antara lain : 1) SDM penyusun laporan keuangan pada tingkat satker dan wilayah belum memadai. 2) Komitmen yang belum memadai. (Kementerian Agama 2016.)

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus masih adanya sebagian administrasi keuangan yang belum memadai, masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran karena kelalaian dalam pelaksanaan anggaran, masih kurangnya pengetahuan pegawai terhadap regulasi di bidang akuntansi pemerintahan, belum optimalnya sistem pengendalian intern disatuan kerja lingkungan Kementerian Agama Kudus (kementrian agama kabupaten kudus).

Sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif secara terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk di perhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan mencegah terjadinya kerugian negara demi kepentingan masyarakat dan daerah( Liza mutiana, 2017)

Sistem pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat di simpulkan bahwa Sistem pengendalian Intern yang di terapkan pada masing – masing instansi pemerintah sangat baik (Febriyan Mohal, 2017)

Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memproses dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Merlyn, 2015)

Peneliti ini mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan Liza Mutiana, dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Alasan peneliti mengacu penelitian Liza Mutiana dkk (2017) adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini karena dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan terdapat penambahan variabel dari penelitian sebelumnya, variabel independen yang

ditambahkan dalam penelitian ini yaitu prinsip pengelolaan keuangan. Alasan peneliti menambahkan variabel prinsip pengelolaan keuangan karena prinsip pengelolaan keuangan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atastujuan yang akan dicapai. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Di Kementrian Agama Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian “ **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI, PRINSIP PENGELOLAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS**”

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini di satuan kerja di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus.
2. Responden yang diteliti adalah karyawan yang bekerjanya berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yakni: Bidang Anggaran, Penbedaharaan, Pegawai bagian akutansi/keuangan.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan.

4. Variabel independen dalam penelitian ini ada lima yakni Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi, Prinsip Pengelolaan Keuangan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: masih adanya sebagian administrasi keuangan yang belum memadai, masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran karena kelalaian dalam pelaksanaan anggaran, masih kurangnya pengetahuan pegawai terhadap regulasi di bidang akuntansi pemerintahan, belum optimalnya sistem pengendalian interen disatuan kerja lingkungan Kementerian Agama Kudus.

Berdasarkan urian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama ?
2. Apakah Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama?
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama?
4. Apakah Komitmen Organisasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama?

5. Apakah prinsip pengelolaan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian adalah berikut ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama .
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Komitmen Organisasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip pengelolaan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian agama.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah akademik, khususnya dibidang akuntansi sehingga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat membantu proses pembelajaran ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan teknologi sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian intern, teknologi informasi , kualitas sumber daya manusia,

komitmen organisasi, prinsip pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian agama kabupaten kudus.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris yang menunjukkan ada/tidaknya pengaruh pengendalian intern, teknologi informasi , kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, prinsip pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian agama kabupaten kudus.

Dan juga memberikan bukti empiris seberapa besar ada/tidaknya pengaruh pengendalian intern, teknologi informasi , kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, prinsip pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian agama kabupaten kudus. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi masukan bagi pihak organisasi akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan.